

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih dulu terbit yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Kekurangan yang dapat dicatat dari dua Undang-Undang terdahulu adalah perlunya mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Sebab diyakini, pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Dengan metode pemilihan langsung kemungkinan kolusi antar anggota DPRD untuk menggolkan calon kepala daerah tertentu yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat dapat dieliminasi (Daniel S.Salossa, 2005:9)

Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah. Desentralisasi secara garis besar mencakup dua aspek, yaitu desentralisasi administrasi dan desentralisasi politik. Berdasarkan perspektif administratif, desentralisasi didefinisikan sebagai *the transfer of administrative responsibility from central to local governments*. Berdasarkan perspektif administratif desentralisasi sesungguhnya kata lain dari dekonsentrasi. Dekonsentrasi

sendiri menurut Parson, adalah *the sharing of power between members of the same ruling group having authority respectively in different areas of the state*. (Hidayat:2000)

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung tidak diatur secara khusus dalam undang-undang sebagaimana ketentuan tentang pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam salah satu bagian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dalam Bagian Kedelapan Pasal 56 sampai dengan Pasal 119. Sebelumnya, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan dan dipilih oleh DPRD setempat. (Purwo Santoso,2005:19)

Perubahan sistem dan model pemilihan kepala daerah pada dasarnya adalah bagian dari agenda *electoral reform* di Indonesia. Kerangka pikir yang mendasari *electoral reform* disamping untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, juga untuk membangun sistem pemerintahan presidensiil di tingkat lokal. Pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis. Dalam konteks ini

negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup rakyat daerah. (Joko Prihatmoko, 2005:21)

Sejak digulirkannya wacana Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tersebut, sebagai contoh di Jawa Timur sendiri semasa tahun 2005-2006 sudah ada 20 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pilkada termasuk yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2006 adalah pilkada Kabupaten Sampang yang diselenggarakan pada 6 September 2006 yang pada waktu itu diperkirakan banyak orang akan rentan menimbulkan konflik. Sementara pada tahun 2007 ada satu daerah yang telah menyelenggarakan pilkada yaitu kota Batu. Selanjutnya pada kurun tahun 2008 nanti beberapa kabupaten juga akan melaksanakan Pilkada secara bersamaan dengan Pilkada Provinsi.

Pelaksanaan pilkada secara langsung ini ternyata juga telah menimbulkan beberapa dampak negatif, diantaranya (1) biaya yang dikeluarkan akan semakin besar (2) tidak menjamin adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pilkada langsung ini (3) bisa juga mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing daerah yang menyelenggarakan pilkada langsung tersebut. Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya pilkada langsung tersebut maka ada salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan menggelar pemilihan kepala daerah gabungan antara pilkada tingkat I dengan pilkada tingkat II secara bersamaan yang dikenal dengan pilkada gabungan. Ada dua aspek penting mengapa pilkada gabungan pada tahun 2008 mulai diwacanakan?

Pertama, pilkada gabungan dapat diselenggarakan apabila akhir masa jabatan gubernur bersamaan dengan akhir masa jabatan kepala daerah di kabupaten/kota. Dasar hukum yang dipakai sudah jelas dan kuat yaitu menggunakan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 235 memungkinkan menggelar pilkada gabungan, yaitu hari pemungutan suara Pilgub dapat diselenggarakan bersamaan dengan Pilkada kabupaten/kota apabila berakhirnya masa jabatan pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu antara 1 sampai dengan 30 hari.

Beberapa daerah di Indonesia telah menyelenggarakan pilkada gabungan, diantaranya Jawa Tengah pada saat Pilgub 22 juni 2008 telah menyelenggarakan Pilgab dengan 1 kabupaten saja yaitu Kabupaten Temanggung karena sebelum Pilgub sudah 30 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada, dan sisanya 4 kabupaten/kota diselenggarakan setelah Pilgub. Dengan demikian pada saat itu Pilgab sudah mempunyai payung hukum yang kuat. Kedua, Pilgab dilaksanakan secara serentak antara Pilgub dengan Pilkada di kabupaten/kota yang tersisa (belum melaksanakan Pilkada 2008), dengan pertimbangan dapat menghemat biaya, waktu serta mengurangi kejenuhan pemilih. Persoalan biaya tentu tidak hanya dibebankan APBD Provinsi saja tetapi sebaiknya juga dibebankan APBD Kabupaten/Kota, seperti yang pernah dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Juni 2005, saat menggelar Pilgab dengan 7 kabupaten/kota. Mereka melakukan share dengan cara 60% dibiayai APBD kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada dan 40% dibiayai APBD provinsi. KPU Sulawesi Utara Juni 2005 menyelenggarakan Pilgab dengan 3 kabupaten/kota dengan melakukan share 79,1% dibiayai APBD kabupaten/kota dan 22,9% dibiayai APBD provinsi. KPU

Sumatera Barat ketika menggelar Pilgab dengan 10 kabupaten/kota pada Juni 2005 melakukan share dengan cara honor PPK,PPS sampai KPPS ditanggung APBD kabupaten/kota sedangkan biaya operasional ditanggung APBD provinsi. KPU Bengkulu yang sudah menggelar Pilgab dengan 5 kabupaten/kota Juni 2005, melakukan share dengan cara semua biaya Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota dibebankan APBD provinsi kecuali surat suara Pilkada kabupaten/ kota dibiayai APBD setempat. Sedangkan bagi kabupaten/kota di 4 provinsi tadi yang tidak menggelar Pilkada di kabupaten/kota, semua biaya dibebankan ke APBD Provinsi hemat waktu menyelenggarakan pilgab menghemat waktu.

Keberhasilan dari pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dilihat dari sejauh mana proses tersebut secara kualitatif mendorong demokratisasi di tingkat lokal. Terkait dengan tujuan demokrasi di tingkat lokal, pada tataran prosedur, pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki serangkaian masalah dan hambatan, yaitu: pertama, persoalan partisipasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung akan mendorong peningkatan kualitas demokrasi lokal apabila ada kesadaran kritis dari masyarakat untuk menggunakan hak-haknya. Persoalan yang mendesak dari segi partisipasi ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah pada partai politik dan otonomi daerah. Kondisi ini cenderung mendorong perilaku tidak memilih (golongan putih/golput) sebagai bentuk protes terhadap sistem politik.

Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah munculnya pola-pola partisipasi semu sebagai hasil mobilisasi dan pembelian suara. Peluang ini sangat dimungkinkan oleh kelemahan sistem administrasi kependudukan, dan

kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rawan disuap. Kedua, persoalan kompetisi dan kredibilitas serta kemampuan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPUD memiliki posisi yang cukup besar dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sementara pertanggungjawaban KPUD kepada publik tidak diatur secara jelas dan hanya mempertanggungjawabkan anggaran kepada DPRD. Pada sisi pengawasan, anggota panitia pengawas diangkat dan bertanggungjawab kepada DPRD, sehingga mengurangi independensi panitia pengawas. Terlebih lagi undang-undang tidak banyak mengatur limitasi pengkajian laporan dan level pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara-perkara yang timbul dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Ketiga, menyangkut persoalan kebebasan sipil, yaitu adanya penggunaan instrumen-instrumen kekerasan untuk memaksa memilih melalui intimidasi, teror dan premanisme. Persoalan kebebasan juga terkait dengan miskinnya informasi pemilih terhadap proses penjangkaran kandidat, maupun pendanaan pemilihan. (Arynta Nugraha, 2005:74)

Persoalan selain yang dikemukakan di atas adalah munculnya persoalan hukum yang terjadi pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah. Persoalan-persoalan hukum ini antara lain adalah terjadinya sengketa antar peserta, penyimpangan atau pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana. Khusus menyangkut terjadinya sengketa pemilihan kepala daerah, proses hukum penyelesaian sangat tergantung dengan kesediaan masing-masing peserta pemilihan kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan yang timbul, yang

dalam prosesnya menjadi wewenang panitia pengawas pemilihan kepala daerah untuk menyelesaikannya. Berkait dengan pelanggaran administrasi, menjadi wewenang KPUD untuk menyelesaikan atau memberi sanksi setelah mendapatkan rekomendasi dari panitia pengawas pemilihan. Namun demikian, akan sangat berbeda apabila sudah menyangkut persoalan pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah, karena disamping memiliki pengaruh terhadap pelaku tindak pidana berupa sanksi pidana, dalam pasal-pasal tertentu pelanggaran tersebut berakibat pula pada keabsahan hasil pemilihan kepala daerah.

Pelanggaran pemilihan kepala daerah secara pidana khusus diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal-pasal dalam ketentuan tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman dan tata cara beracara yang berbeda.

Hukum pidana pada dasarnya memiliki dua unsur pokok. Pertama adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau perintah (kaidah) yang berasal dari bidang-bidang hukum yang lain, seperti bidang hukum tata negara, bidang hukum tata usaha negara, dan bidang hukum perdata. Kedua, adanya sanksi atas pelanggaran norma tersebut berupa ancaman dengan hukum pidana. Pelanggaran atas norma-norma dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, pertama-tama diselesaikan dengan sanksi administratif. Apabila, sanksi administratif belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, barulah

dijatuhkan sanksi pidana sebagai sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.(Wirjono.2003:13-17)

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Lima pasal tersebut terdapat dalam Bab IV, Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana “Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih, penyuapan, perbuatan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain, dan menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat. (Topo Santoso, 2006:-13)

Praktik melawan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, disamping diatur dalam KUHP juga diatur dalam undang-undang yang lain. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pemilihan umum antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, kesemuanya tentang pemilihan umum. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tindak pidana mana dalam ketentuan-ketentuan tersebut, secara umum meliputi jenis-jenis perbuatan memberi keterangan tidak benar,



meniru atau memalsu surat, menyimpan surat palsu untuk menggunakan atau digunakan orang lain, menggunakan atau menyuruh orang menggunakan surat palsu, menyimpan surat yang tidak sah untuk menggunakannya atau dipergunakan orang lain, menghalangi atau mengganggu pemilihan umum, menghalangi orang memilih dengan kekerasan atau ancaman, penyuapan, melakukan tipu muslihat, mengaku sebagai orang lain, memberi suara lebih dari sekali, menggagalkan pemungutan suara, dan majikan yang menghalangi pemungutan suara, serta penyelenggara pemilihan yang melalaikan kewajiban. (Topo Santoso, 2006:13-27)

Mengacu pada ketentuan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, yaitu tindak pidana yang terjadi berkaitan dengan diadakannya pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dalam perkembangannya diatur juga tindak pidana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, serta tindak pidana di dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah secara langsung mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan sanksi di seluruh tahapan pelaksanaan, yaitu pada tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahap persiapan, meliputi:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;

e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Tahapan pelaksanaan meliputi :

a. Penetapan daftar pemilih;

b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

c. Kampanye;

d. Pemungutan suara;

e. Penghitungan suara; dan

f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana semata. Lebih dari itu, adalah memiliki pengaruh terhadap keabsahan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam Pasal 82 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 misalnya, disamping sanksi pidana dibebankan kepada pelaku, juga diikuti oleh tindakan administratif berupa pencabutan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Agar tujuan pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu terjadinya demokratisasi di tingkat lokal tercapai, maka segala bentuk pelanggaran terutama berkaitan dengan tindak pidana harus dilakukan tindakan secara tepat. Prosedur

penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pemilihan kepala daerah, terutama hukum acara pidana menjadi sarana yang sangat penting untuk menjamin diterapkannya aturan-aturan pemilihan kepala daerah.

Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang juga telah melaksanakan pilgab pada tahun 2008 yaitu Pemilihan gubernur yang diadakan secara bersama dengan pilkada dari empat daerah kab/kota di Jawa Timur, diantaranya Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kota Malang, dan Kabupaten Jombang. Secara umum dengan diadakannya pilgab tersebut tidak menimbulkan permasalahan dalam arti konflik atas pelaksanaan pilgab tersebut. Tetapi yang perlu diperhatikan disini adalah terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Timur, yang pada hasil pilgub putaran pertama telah menimbulkan sengketa atas hasil pilgub tersebut. Memang dalam usaha pemerintah kita untuk mewujudkan proses demokrasi yang tepat untuk bangsa ini, melalui metode atau cara pilgab diharapkan akan mewujudkan kelancaran dalam proses berdemokrasi. Disamping ada sisi positif dari pelaksanaan pilgab tersebut, tetapi sisi negatifnya pasti ada. Dan konflik sebagai salah satu hal yang menjadi sisi negatif tersebut memang sangat sulit untuk dihindarkan, terbukti dari sengketa-sengketa pilkada yang terjadi di banyak daerah di Indonesia, tidak terkecuali Jawa Timur. Padahal keberhasilan dan penyelenggaraan pilkada di Jawa Timur diharapkan bisa menjadi acuan untuk penyelenggaraan pemilu legislatif. Tapi justru Jawa Timur juga mengalami yang namanya konflik atas sengketa pilgub putaran pertama. Seperti kita ketahui bersama bahwa adanya sengketa hasil perhitungan suara pada pelaksanaan pilkada Jatim telah membawa sengketa tersebut sampai ke

Mahkamah Konstitusi, hal tersebut sudah tepat berdasarkan aturan yang berlaku meski ditengarai putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan pilkada ulang jatim di beberapa daerah seperti Bangkalan, Sampang dan Pamekasan masih dirasa belum memenuhi keadilan secara substantif. Tapi putusan tersebut tetap harus kita hormati dan kita laksanakan.

Kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa terhadap selisih perhitungan suara, lalu sekarang bagaimana dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditengarai bersifat pidana? Apakah disini penerapan aspek hukum pidana dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah berfungsi optimal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “ **Penegakan Hukum Pidana Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur di Jawa Timur** ”

## **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Timur Tahun 2008 ?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran pidana yang terjadi dalam pemilihan gubernur Jawa Timur ?
- c. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana pada pemilihan gubernur Jawa Timur ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

#### **a. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Timur pada tahun 2008
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran pidana yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana terhadap pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2008

#### **b. Manfaat Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara ilmiah yaitu untuk kepentingan akademis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi informasi yang obyektif khususnya dalam bidang pengembangan hukum pidana serta hukum tata negara pada umumnya.
2. Manfaat secara praktis yaitu dengan penelitian ini akan diperoleh informasi dan gambaran dinamika pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya mengenai upaya penegakan hukum pemilihan gubernur di Jawa Timur
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan (*decision makers*) baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang pemilihan kepala daerah di masa mendatang khususnya mengenai aspek hukum pidana dalam peraturan yang ada.

#### **D. Metode penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang disajikan secara sistematis dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Setiap melakukan penelitian maka harus menggunakan metode-metode tertentu. Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto : 1986) :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan metode pendekatan non doktrinal (*socio legal research*), yang bersifat kualitatif. Metode pendekatan non doktrinal (*socio legal research*) diterapkan karena dalam penelitian ini disamping dipelajari peraturan-peraturan perundangan, juga diteliti mengenai bagaimana fakta-fakta yang terjadi secara faktual dalam masyarakat, yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam pelaksanaan pemilihan gubernur di Jawa Timur tahun 2008.

Penerapan metode kualitatif pada penelitian ini adalah untuk mengungkap kebenaran dan memahaminya. Penelitian ini

menggunakan pendekatan induktif, yaitu mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan masyarakat dengan memulainya dari kenyataan (phenomena) menunjukkan ke teori (thesis) bukan sebaliknya seperti dalam pendekatan deduktif.(Burhan Ashofa, 1998:74)

## 2. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, jenis penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- a. Penelitian eksploratoris;
- b. Penelitian deskriptif;
- c. Penelitian eksplanatoris.

Sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif maksudnya penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi, kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Tujuan dari penelitian adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.(Suryabrata, 1988:19) Jadi dalam penelitian ini nantinya akan menggambarkan secara jelas dan akurat mengenai bagaimana pelaksanaan pemilihan gubernur di Jawa Timur Tahun 2008? Pelanggaran-pelanggaran apa sajakah yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan gubernur di Jawa Timur terutama

pelanggaran yang ditengarai bersifat pidana, serta bagaimana upaya penegakan hukumnya.

### 3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tentang penegakan hukum pidana dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Propinsi Jawa Timur ini dibatasi pada analisis dengan obyek sekaligus subyek penelitiannya adalah pelaksanaan Pilkada Jawa Timur. Menyadari bahwa lingkup penelitian dimaksud cukup luas dan guna memperoleh hasil penelitian yang kontributif (bernilai guna) dan optimal, maka penelitian dibatasi pada ruang lingkup pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya pelanggaran pidana serta upaya penegakan hukumnya selama Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008.

### 4. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari:
  1. Pejabat atau Pegawai yang bertugas di Kantor Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur;
  2. Panitia Pengawas Pemilu pada saat pelaksanaan pemilihan gubernur di Jawa Timur tahun 2008;



3. Tim sukses dari masing-masing calon peserta pemilihan gubernur di Jawa Timur.
- b. Data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah serta Peraturan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di beberapa daerah.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan dengan penegakan hukum pidana pada pelaksanaan pemilihan gubernur di Jawa Timur.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus. (Soerjono Soekanto : 1986)

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut :

### a. Wawancara tidak terarah/tidak berstruktur.

Teknik wawancara ini merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dan responden, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang

diteliti. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. Peneliti tidak memberikan pengarahan secara tajam, tetapi diserahkan pada responden untuk memberikan penjelasan secara bebas “*free folowing interview*”. Keuntungan penggunaan tipe ini adalah : 1). Mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada spontanitas. 2). Lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan. 3). Lebih banyak kemungkinan untuk menjelajahi berbagai aspek dari masalah yang diajukan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2000 : 60).

- b. Studi kepustakaan, yaitu suatu betuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitain terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dengan analisis akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis

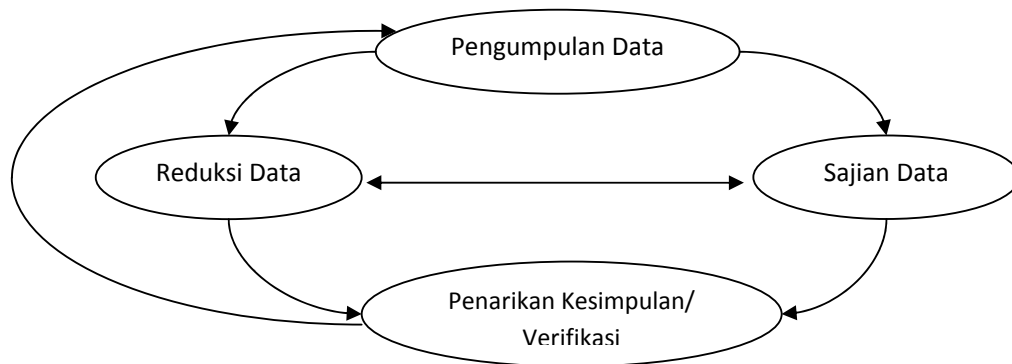
data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam analisis kualitatif ini, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus. Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka penginterpretasian terhadap apa yang ditentukan dan pengambilan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi ketat, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan, sehingga peneliti akan dengan mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- c. *Canclution drawing* dari awal pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara

pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data diatas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (HB Sutopo, 1998:37).



Bagan 1.5 Siklus Analisis Data

Untuk meneliti validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang sama dari sumber yang lain. Triangulasi dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.